

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan arah pembangunan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralisasi membawa angin segar bagi pemerintahan daerah, untuk terciptanya pemerintahan yang berbasis kepada aspirasi masyarakat. Di antara aspek penting yang menjadi urusan pemerintahan daerah yaitu pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa tidak hanya sebatas pada alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, lebih dari itu juga harus mengedepankan asas pengelolaan yang baik dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya dan meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran. Proses perencanaan dan pengeloan dana desa dimulai dari adanya penyusunan RPJM desa dengan menitikberatkan pada bidang pembangunan desa, pemberdayaan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemerintahan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa disusun dengan melibatkan masyarakat desa, agar tersaringnya aspirasi serta gagasan dari masyarakat.

Setelah RPJM ditetapkan, pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Wali Nagari berdasarkan RKP menyusun rancangan kebijakan umum APBDes. Rancangan kebijakan umum APBDes yang telah dibahas Wali Nagari bersama lembaga terkait layaknya Muna (Musyawarah Nagari), selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APB (KUA).¹

¹ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747> di akses pada 5/3/2020 pukul 10:21 Wib.

Pada dasarnya partisipasi mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat, baik itu berupa dukungan, kritikan yang konstruktif, maupun gagasan dalam ekonomi, politik, budaya dan infrastruktur masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang bersifat *Top-down*, partisipasi masyarakat dalam sistem yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan. Namun, berbeda halnya dengan sistem pemerintahan yang bersifat *Bottom-up*.² Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam praktik lapangan dewasa ini terdapat dua paham teori sosial yang kontradiktif yang melibatkan setiap kelompok sosial masyarakat, yakni antara teori-teori sosial yang digolongkan pada “teori sosial regulasi” berhadapan dengan teori-teori sosial emansipatori atau juga yang dikenal dengan aliran kritis. Teori sosial regulasi yang bersemboyan bahwa ilmu sosial harus mengabdikan pada stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan bersifat objektif serta secara politik netral dan bebas nilai. Dalam pandangan ini teori sosial dikontrol oleh teoritisasi yang memunculkan kaidah “rekayasa sosial” yang menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek dari pembangunan. Tanpa kesadaran ideologis dan teoritis secara kritis (Fakih, 2001: 7).

² “Perencanaan pembangunan pasca 1 Januari 2001 terdiri atas proses *top-down* dan *bottom-up*. Namun dalam kenyataannya masih banyak didominasi oleh pendekatan *top-down*, di mana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal....Proses *top-down* dimulai dari pembahasan GBHN oleh MPR diikuti dengan penyusunan PROPENAS oleh pemerintah pusat untuk memberikan arahan bagi tujuan, kebijakan, dan program pembangunan nasional. Rencana strategis pembangunan (RENSTRA) disusun berdasarkan PROPENAS dan diikuti dengan penyusunan rencana pembangunan nasional tahunan (RAPETA) yang menetapkan prioritas anggaran pembangunan nasional. RENSTRA menekankan program untuk mencapai misi yang telah dinyatakan dalam PROPENAS, sedangkan RAPETA memberikan program dan kegiatan yang lebih terperinci untuk menghubungkan rencana pembangunan pemerintah dengan anggaran pembangunan pusat untuk tahun yang akan datang. Proses *top-down* perencanaan pembangunan tahunan dimulai ketika setiap tingkatan pemerintahan memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya, peran pemerintah adalah mendorong proses ini berjalan.. Proses *bottom-up* seperti yang dianjurkan dalam kerangka prosedural yang disebut peraturan K5D, merupakan proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun draf proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Proses ini dimulai dari musyawarah pembangunan desa (Musbanges), yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), LKMD, LSM, dan perwakilan kecamatan. Tujuan utama pertemuan ini adalah menyusun proposal proyek yang akan diajukan ke tingkat yang lebih atas (kecamatan). Dalam pertemuan ini akan disaring proyek-proyek yang tidak efektif, tumpang-tindih, dan bukan prioritas, dan menambah proyek dari tingkat kecamatan. Proses yang sama diulangi pada tingkat provinsi, hingga pemerintah memutuskan proyek yang akan dibiayai dengan APBN, Rujuk Perencanaan Pembangunan Daerah (Kuncoro, 2018).

Tugas ilmuan tidak hanya melihat perubahan, tetapi juga mengkritisi perubahan dengan cara memberikan penyadaran secara kritis kepada masyarakat dan struktur sosial.³ Dengan pemahaman seperti itu, Mansour Fakih kemudian mensejajarkan kata “pembangunan” dengan “Perubahan Sosial”, yakni bagaimana suatu masyarakat berubah serta dinamika dan proses sekitar perubahan tersebut. Perubahan dan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat kita lihat dalam halnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan oleh pemerintah.⁴

Partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam pembangunan desa. Salah satunya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa selaku pemerintahan bermusyawarah dengan masyarakat dalam hal penggunaan dana desa, tertuang dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) desa. Masyarakat dihimbau untuk ikut serta dalam mengawasi penyaluran dana desa. Melalui partisipasi dalam mengikuti musyawarah desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa masyarakat dapat memberikan opini dalam penyusunan program anggaran. Dengan demikian program anggaran secara tidak langsung mendapat legitimasi dari masyarakat.

Nagari Situjuah berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh JurnalSumbar.com pada 31 Januari 2019 menjadi salah satu nagari yang memiliki klinik keuangan pengelolaan dana desa terbaik selain Kecamatan Kapur IX. Hal ini dituturkan oleh Widya Putra, Sekretaris Daerah

³Teori sosial harus membangkitkan kesadaran kritis, baik bagi yang mendominasi maupun yang didominasi, untuk perubahan menuju terciptanya suatu hubungan (struktur) dan sistem sosial yang secara mendasar lebih baik, yakni suatu sistem masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa kekerasan. Dengan demikian tugas teori sosial adalah memanusiakan kembali manusia yang telah lama mengalami dehumanisasi, baik yang menindas maupun yang ditindas. Rujuk Teori Pembangunan dan Globalisasi (Mansour Fakih, 2001).

⁴ Alastaire White, mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat (Sunarti, 2003).

Kabupaten Limapuluh Kota didampingi Kepala Badan Keuangan Irwandi, Asisten II Fitma Indrayani, dan Kepala Bidang Data Evaluasi Dandipbang Syofian Hendri.⁵

“Wewenang dari bupati diberikan kepada camat untuk menunjuk stafnya di Klinik Keuangan. Badan Pengawas Keuangan (BPK) melirik sebagai *treatment* andalan Kabupaten Limapuluh Kota dalam pengelolaan keuangan negara ... Kita mendorong agar Klinik Keuangan di kecamatan bisa terus meningkatkan kinerjanya agar dana desa yang diberikan pemerintah pusat dapat maksimal penggunaannya,” kata Widya sembari menyebutkan, saat ini Klinik Keuangan di Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Situjuh merupakan klinik terbaik.”

Hal ini kemudian juga turut dijelaskan oleh Widya Putra kepada *dekade.pos* bahwasanya salah satu hal yang paling menonjol dari pengelolaan dana desa / dana nagari di Kabupaten Limapuluh Kota adalah adanya Pelimpahan Kewenangan Pembinaan Keuangan dari Bupati ke Camat, dengan adanya kegiatan yang dinamakan dengan Klinik Keuangan di setiap kecamatan yang ditunjuk oleh Camat setempat dan diatur oleh Peraturan Bupati, di mana Klinik inilah yang melaksanakan pengawasan terhadap Nagari yang mengelola dana desa. Klinik keuangan yang dibentuk nantinya juga langsung melakukan pembinaan kepada BUMNag, semua hal yang berkaitan tentang Keuangan Nagari di sanalah kerja Klinik Keuangan ini, fungsinya untuk mempermudah akses ke pemerintah daerah melalui camat.⁶

“Wewenang dari Bupati diberikan kepada Camat untuk menunjuk staffnya di Klinik Keuangan, dan ternyata Badan Pengawas Keuangan (BPK) melirik ini sebagai *treatment* andalan Kabupaten Limapuluh Kota dalam pengelolaan keuangan negara... Kita membentuk Klinik Keuangan di kecamatan supaya pelayanan pemerintahan lebih efektif, walaupun ada kasus, camat bisa menyelesaikan sebelum kasus ini membesar karena camatlah yang terlibat langsung, dengan di delegasikan dengan Peraturan Bupati tersebut... Adapun Klinik Keuangan yang terbaik ada di Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Situjuh, dan kita mendorong kepada kecamatan lain agar dapat meningkatkan kinerjanya agar dana desa yang jumlahnya meningkat ini bisa kita maksimalkan kepada masyarakat banyak”

⁵ <http://jurnalsubar.com/2019/01/2019-limapuluh-kota-dapat-alokasi-dana-desa-rp75-miliar/>. Di akses pada 9/10/2019 18:53 Wib.

⁶ <https://www.dekadepos.com/2019/01/29/dana-desa-ditambah-15-milyar-limapuluh-kota-lakukan-pengawasan-melalui-klinik-keuangan/>. Diakses pada 4/4/2020 10:37 Wib.

Nagari Situjuh Gadang ditetapkan sebagai salah satu pemilik klinik keuangan terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota, menimbulkan pertanyaan tentang tingkat partisipasi masyarakatnya dalam hal pengelolaan dana desa. Previews studi menjelaskan pengelolaan dana desa yang baik selalu diiringi dengan unsur partisipasi masyarakat yang juga meningkat sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Tisya Alya Arifiany&Sofyan Sjaf (2018) menemukan ada keseimbangan antara pengelolaan dana desa yang baik dengan cerminan transparansi dan akuntabilitas yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat. Tisya& Sofyan juga menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Begitu pula halnya dengan Nagari Situjuh Gadang di Kabupaten Limapuluh Kota yang seharusnya juga turut diiringi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dengan pengelolaan keuangan terbaik tersebut.

Namun berbeda halnya dengan yang peneliti temui di lapangan, masih terdapatnya sebagian besar masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam hal pengelolaan dana desa dan tingkat keingintahuan masyarakat terkait dana desa masih tergolong rendah di Nagari Situjuh Gadang tersebut. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini tidak lain disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Nagari Situjuh Gadang tersebut. Kurangnya komunikasi perangkat nagari dalam mensosialisasikan program dan dana desa yang diikuti dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dana desa.⁷

⁷ Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Dewi Listyawati, Sarmiati dan Asmawi (2019) dengan judul penelitian “Komunikasi Perangkat Nagari dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” yang mengatakan bahwasanya kurangnya komunikasi perangkat nagari dalam mensosialisasikan program dan dana desa yang diikuti dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dana desa. Rujuk lebih lanjut(Listyawati et al., 2019).

Nagari Situjuh Gadang dinyatakan menjadi klinik keuangan terbaik yang diiringi dengan partisipasi masyarakatnya yang cukup tinggi, namun dengan tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah, dan pekerjaan masyarakat yang sebagian besar sebagai petani dan buruh. Sebagaimana diketahui tingkat partisipasi dalam masyarakat tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi masyarakat. Peneliti berasumsi bahwa partisipasi yang ada dalam Nagari Situjuh Gadang merupakan suatu bentuk partisipasi yang ada dalam rekayasa sosial, dengan tidak menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan. Dalam hal ini dapat saja masyarakat Situjuh Gadang dibina, diarahkan, dikontrol menurut selera pemerintah. Kebijakan yang mengantarkan Nagari Situjuh Gadang ini bukanlah murni berasal dari aspirasi masyarakat. Akan tetapi, dapat juga bentuk partisipasi yang tinggi tersebut memang berasal dari masyarakat yang telah terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan dana desa.

Berdasarkan realita di lapangan, ada keunikan dalam melihat partisipasi masyarakat di Nagari Situjuh Gadang tersebut. Dengan kondisi keterbatasan mereka dari segi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, namun mereka berhasil menempatkan nagari ini sebagai pengelola keuangan terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota. Tentu ini perlu dipelajari lebih mendalam, apalagi belum ada kajian sejenis yang melihat dimensi ini dalam pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi masyarakat ini tidak lepas dari faktor-faktor yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri, seperti pendidikan, pekerjaan dan status sosial ekonomi yang dimilikinya. Jenjang pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat akan memberikan pengaruh yang signifikan atas pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Daerah dengan jumlah penduduk yang

tinggi diiringi dengan tingkat pendidikan yang juga memadai akan menciptakan suatu pengelolaan dana desa yang baik dengan keikutsertaan masyarakatnya, begitu juga sebaliknya. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, namun tidak memiliki indeks pendidikan yang memadai akan cenderung terkendala dalam hal pengelolaan dana desa.

Berbeda halnya dengan Nagari Situjuh Gadang dengan jumlah penduduk yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi yaitu sejumlah 5.908 jiwa. Dari total jumlah penduduk keseluruhan tersebut terdapat 4.213 jiwa yang telah berusia 17 tahun ke atas. Namun, dari jumlah penduduk yang tinggi ini sebagian besar penduduk di Nagari Situjuh Gadang yang tidak tamat sekolah dasar sejumlah 2.159 jiwa, tamat SD/ sederajat 787 jiwa, menengah pertama 652 jiwa, dan yang menamatkan sekolah menengah atas hanya sejumlah 907 jiwa. Kemudian dari total jumlah penduduk yang sebesar 5.908 jiwa ini yang menempuh pendidikan tinggi hingga Diploma IV/Strata I hanya berjumlah 177 jiwa, dan yang berpendidikan hingga Strata II hanya 3 jiwa saja.⁸

Dari total penduduk dan indeks pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di Nagari Situjuh Gadang ini mengantarkan Nagari Situjuh Gadang menjadi salah satu nagari dari dua nagari di Kabupaten Limapuluh Kota yang ditetapkan sebagai nagari dengan Klinik Keuangan terbaik. Menjadi suatu hal yang menarik dengan ditetapkannya Nagari Situjuh Gadang menjadi klinik keuangan terbaik sedangkan tingkat pendidikan yang tergolong rendah dan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan dengan total 1025 jiwa, dan bahkan dari total penduduk di Nagari Situjuh Gadang terdapatnya 1.347 jiwa yang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Sedangkan dalam hal pengelolaan dana desa sebagian besar masyarakat memiliki partisipasi yang cukup tinggi dengan dibuktikan hadirnya masyarakat dalam

⁸ Sumber data primer dari Kantor Wali Nagari Situjuh Gadang yang dikelola oleh peneliti Pada tanggal 10 Januari 2020

Musyawarah Nagari dalam hal rancangan kerja pemerintahan (RKP) Nagari. Kehadiran masyarakat ini dibuktikan dengan presensi rapat yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari unsur masyarakat dari setiap jorong dan lembaga-lembaga yang terdapat dalam Kenagarian Situjuh Gadang. Seperti unsur Niniak Mamak, Bamus, ibu-ibu pemberdayaan keluarga sejahtera (PKK) , Linmas, dan perangkat lainnya. Seperti terlihat di dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Daftar Kehadiran Unsur Masyarakat Dalam Musyawarah Nagari Perencanaan RKP Nagari

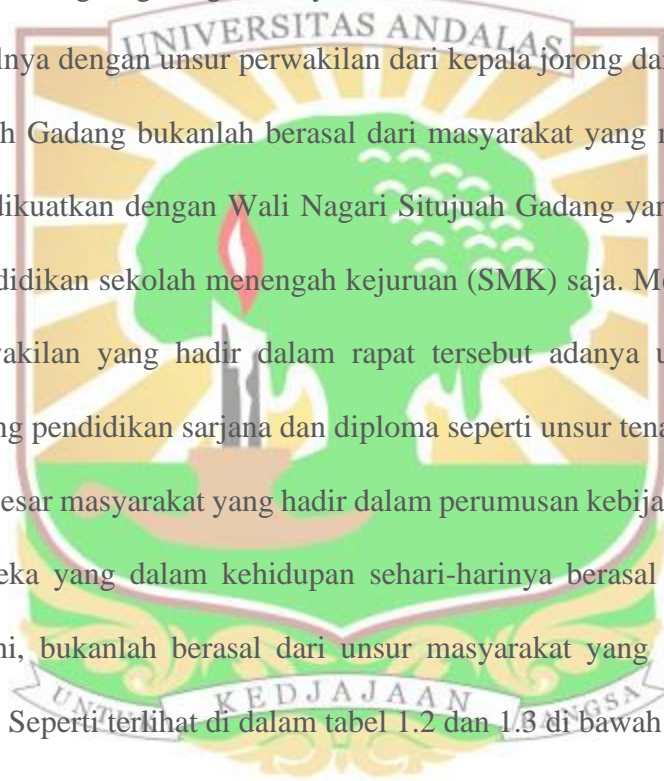
No	Nama Unsur Masyarakat	Jumlah
1.	Tim rancangan kerja pemerintahan (RKP)	5 orang
2.	Tenaga Kesehatan	4 orang
3.	Tenaga Pendidik	7 orang
4.	Tim musyawarah magari	6 orang
5.	Tim pembina kesejahteraan keluarga (PKK)	3 orang
6.	Kepala jorong	3 orang
7.	Tim 5	5 orang
8.	Tim kader kesehatan dan keluarga berencana (KB)	7 orang
9.	Bayangkara embina keamanan dan ketertiban masyarakat (BABINKAMTIBNAS) serta linmas	3 orang
10.	Unsur pemerintahan nagari	7 orang
11.	Utusan camat	3 orang

Sumber : Data Primer (dikelola peneliti dari daftar hadir musyawarah nagari perencanaan AKP Nagari Situjuh Gadang) Tahun 2020.

Dalam hal ini peneliti melihat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Gadang, terdapatnya sebagian besar masyarakat dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan dana desa namun tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki oleh

masyarakat tersebut. Hal ini tergambar dalam kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat, yang mana dalam hal rapat tersebut perwakilan masyarakat yang hadir didominasi oleh masyarakat yang hanya memiliki jenjang pendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah pertama (SMP). Seperti perwakilan dari tim kader kesehatan dan keluarga berencana yang hanya diwakili dari masyarakat yang memiliki pendidikan menengah atas, padahal merekalah yang memiliki intensitas interaksi dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat.

Begitupula halnya dengan unsur perwakilan dari kepala jorong dari beberapa jorong yang ada di Nagari Situjuh Gadang bukanlah berasal dari masyarakat yang memiliki latar belakang sarjana, hal ini juga dikuatkan dengan Wali Nagari Situjuh Gadang yang hanya memiliki latar belakang jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) saja. Meskipun memang dalam beberapa unsur perwakilan yang hadir dalam rapat tersebut adanya unsur masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan diploma seperti unsur tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sebagian besar masyarakat yang hadir dalam perumusan kebijakan nagari tersebut juga didominasi oleh mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya berasal dari orang-orang yang bekerja sebagai petani, bukanlah berasal dari unsur masyarakat yang sering bergelut dengan perumusan kebijakan. Seperti terlihat di dalam tabel 1.2 dan 1.3 di bawah ini.



Tabel 1.2
Data Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tahun 2016-2022

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Fetrizal. DT. Bandaro Putih	L	Ketua	SLTA
2.	Am. DT. Sindo Nan Panjang	L	Anggota	SLTA
3.	M. T. Rajo Panghulu	L	Anggota	S1
4.	Helma, S.Si	P	Anggota	S1
5.	Zondra Madris	L	Anggota	SLTA
6.	Yusmarti	P	Anggota	SLTA
7.	Susrafika, SP	P	Sekretaris	S1

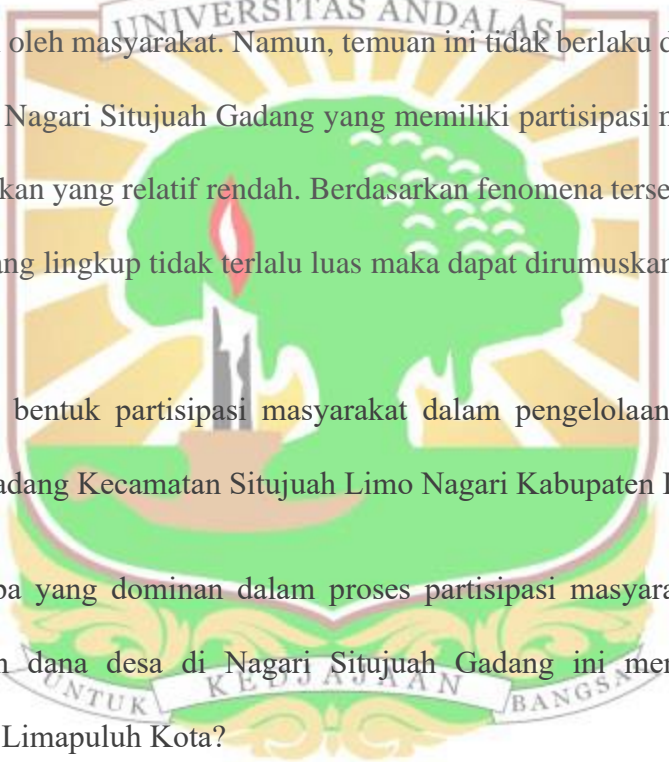
Sumber : Data Primer (dikelola peneliti dari Buku Data Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Situjuh Gadang) Tahun 2020.

Tabel 1.3
Data Aparat Pemerintah Pada Tahun 2018

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Syofiarledi	L	Wali Nagari	SMK
1.	Hendra Joni	L	Sekretaris	S1
3.	Deni Zulya	P	Kaur Keuangan	SMK
4.	Hendra Saputra	L	Kaur Pembangunan	S1
5.	Muthiah As Saidah	P	Bendahara	S1
6.	Mulyadi	L	Kaur Pemerintahan	S1
7.	Ermawanis	P	Staf Umum	SLTA
8.	Fadil	L	Staf Umum	SLTA
9.	Septia Ariska	P	Staf Umum	D3
10.	Afrizal	L	Kepala Jorong Situjuh Gadang	SLTA
11.	Doni Sartika	L	Kepala Jorong Kociak	SLTA
12.	Boby Maulana	L	Kepala Jorong Padang Jariang	SLTA
13.	Arwinsyaf	L	Kepala Jorong Tanjung Simantuang	SLTA
14.	Efrizal	L	Kepala Jorong Tanjung Bungo	SLTA
15.	Ifdal Nasir	L	Kepala Jorong Padang Kuniang	SLTA

Sumber : Data Primer (dikelola peneliti dari Buku Data Aparat Pemerintah Situjuh Gadang) Tahun 2020.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan ditelaah kembali ketika partisipasi yang tinggi dan mengantarkan Nagari Situjuh Gadang menjadi klinik keuangan terbaik, namun tidak diiringi dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di Nagari Situjuh Gadang tersebut. Penelitian Tisya Alya Arifiany&Sofyan Sjaf (2018) menemukan ada keseimbangan antara pengelolaan dana desa yang baik dengan cerminan transparansi dan akuntabilitas yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat. Tisya& Sofyan juga menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, temuan ini tidak berlaku dan memiliki disparitas dengan yang ada pada Nagari Situjuh Gadang yang memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dengan indeks pendidikan yang relatif rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 
- a. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota ?
 - b. Dimensi apa yang dominan dalam proses partisipasi masyarakat tersebut sehingga pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Gadang ini menjadi yang terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

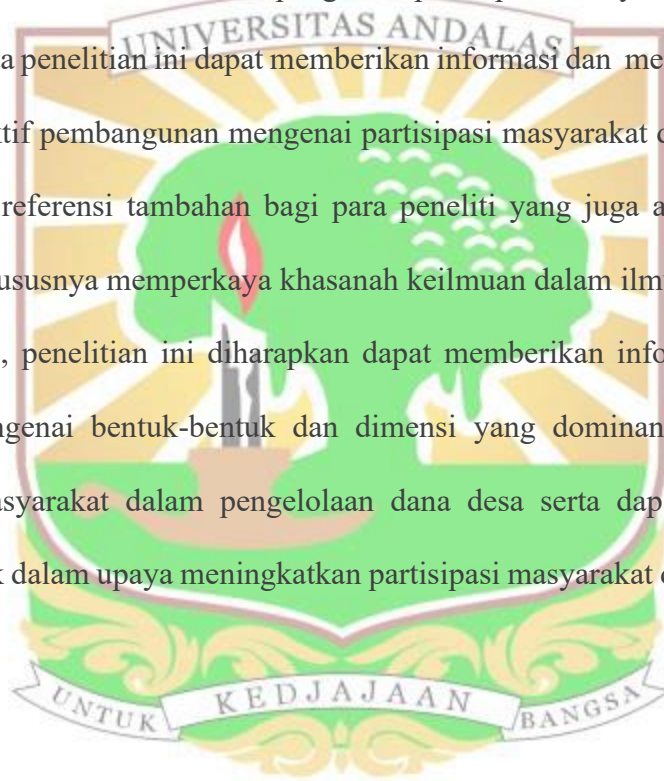
- a. Menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota.
-

-
- b. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan dimensi yang dominan dalam proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan dimensi yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta penelitian ini dapat memberikan informasi dan mengisi kajian data terbaru dalam perspektif pembangunan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai partisipasi, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam ilmu politik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan mengenai bentuk-bentuk dan dimensi yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.





1. Use live layout and alignment guides

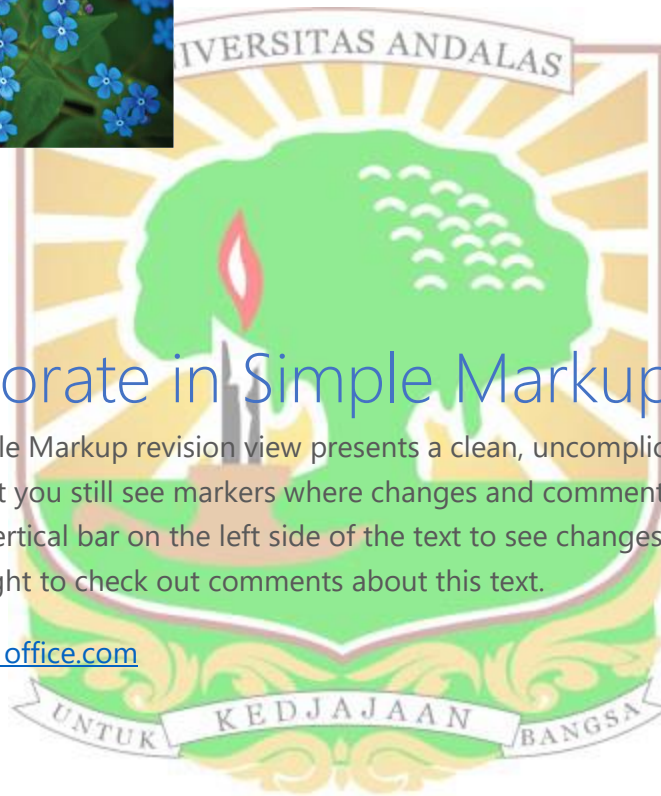
Click the image below and drag it around the page. With images that have text wrapping, the text moves around the picture so you get a live preview of the new layout. Try to line the image up with the top of this paragraph to see how the alignment guides can help you position it on the page. Click the Layout Options button next to the image to change how it interacts with the text. [Learn more at office.com](#)



2. Collaborate in Simple Markup View

The new Simple Markup revision view presents a clean, uncomplicated view of your document, but you still see markers where changes and comments have been made. Click on the vertical bar on the left side of the text to see changes. Or click the comment icon on the right to check out comments about this text.

[Learn more at office.com](#)



3. Insert Online Pictures and Video

Add and play online videos inside your Word documents. Add your pictures from online photo services without having to save them first to your computer. Click **Insert** > **Online Video** to add a video to this document.

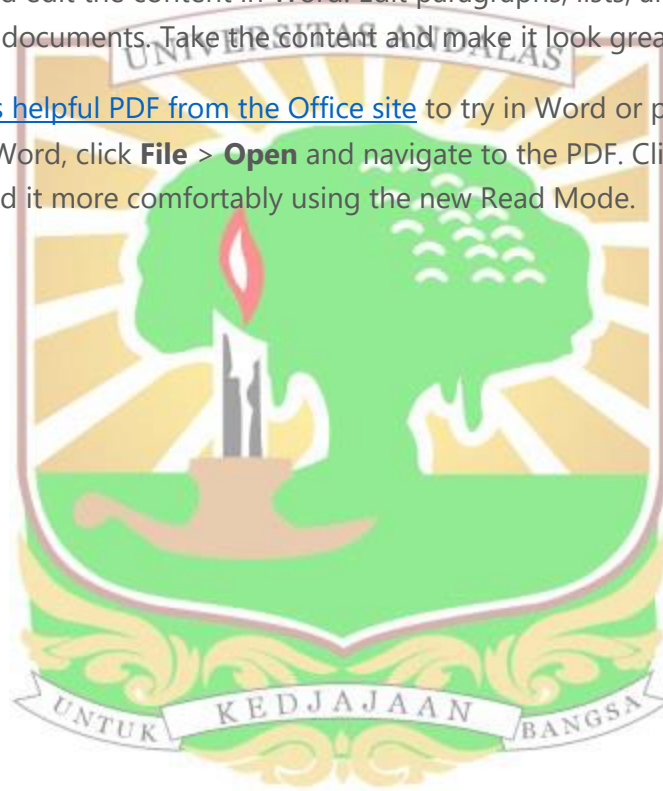
4. Enjoy the Read

Use the new Read Mode for a beautiful, distraction-free reading experience. Click **View > Read Mode** to check it out. While you're there, try double clicking on a picture to get a closer view. Click outside the image to return to reading.

5. Edit PDF content in Word

Open PDFs and edit the content in Word. Edit paragraphs, lists, and tables just like familiar Word documents. Take the content and make it look great.

Download [this helpful PDF from the Office site](#) to try in Word or pick a PDF file on your computer. In Word, click **File > Open** and navigate to the PDF. Click **Open** to edit the content or read it more comfortably using the new Read Mode.



Ready to get started?

We hope you enjoy working in Word 2013!

Sincerely,

The Word Team

Learn More

Keep going. There are lots more new features and ways to work in Office. Check out our [Getting started with Word 2013](#) page online to dive right in.

